

Strategi Pemberdayaan Perwira Keuangan Dalam Mendukung Profesionalisme Kinerja Keuangan Satker (Ku Satker) pada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad)

Herawati¹ Resmanto Widodo² Sigit Purwanto³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: almerlangit@gmail.com¹ resmanto.widodo@gmail.com² sigit.purwanto@idu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan Perwira Keuangan dalam mendukung profesionalisme kinerja Keuangan Satuan Kerja (Ku Satker) pada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad). Penelitian dilaksanakan di Dispenad Jakarta Pusat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi PPSPM, penguasaan aplikasi keuangan, serta dukungan organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan. Strategi yang dihasilkan meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta pengembangan program pembinaan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Perwira Keuangan, Profesionalisme



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan profesional merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), pengelolaan keuangan satuan kerja (Satker) tidak hanya dituntut memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan regulasi, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan tuntutan transparansi publik. Berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, seperti penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), implementasi sertifikasi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan penerapan One Time Password (OTP), menuntut Perwira Keuangan memiliki kompetensi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menjadikan pemberdayaan Perwira Keuangan sebagai aspek strategis dalam mendukung profesionalisme pengelolaan keuangan di lingkungan TNI AD. Perwira Keuangan memiliki peran penting sebagai pengelola administrasi keuangan negara di tingkat satuan kerja. Selain bertanggung jawab terhadap ketepatan penyusunan dokumen keuangan, Perwira Keuangan juga dituntut mampu mengikuti perubahan regulasi, mengoperasikan berbagai aplikasi keuangan, memahami ketentuan perpajakan, serta memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tantangan tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya sistem digital pengelolaan keuangan yang mengharuskan setiap personel memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan

organisasi. Penelitian mengenai profesionalisme aparatur menegaskan bahwa pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah menuntut organisasi untuk meningkatkan kemampuan personel melalui pembelajaran berkelanjutan dan penguatan kapasitas organisasi. Selain itu, berbagai studi mengenai pemberdayaan sumber daya manusia menyatakan bahwa organisasi yang mampu membangun budaya belajar, memperkuat kompetensi teknis, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan memiliki kinerja organisasi yang lebih baik dibandingkan organisasi yang hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, efektivitas implementasi sistem informasi keuangan pemerintah, maupun pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai secara umum. Penelitian yang secara khusus membahas strategi pemberdayaan Perwira Keuangan pada satuan kerja militer, terutama dalam menghadapi perubahan sistem aplikasi keuangan negara, masih sangat terbatas. Padahal karakteristik organisasi militer memiliki sistem komando, mekanisme pengambilan keputusan, serta tuntutan akuntabilitas yang berbeda dengan organisasi pemerintahan sipil. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai strategi pemberdayaan Perwira Keuangan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan di lingkungan TNI AD. Kondisi di Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) menunjukkan bahwa perubahan aplikasi keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, serta perubahan regulasi yang berlangsung secara dinamis masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan satuan kerja. Selain itu, belum seluruh personel memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi keuangan, mekanisme transfer pengetahuan antar personel masih terbatas, serta program pembinaan yang berkelanjutan belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan (*research gap*) antara tuntutan profesionalisme Perwira Keuangan dengan strategi pemberdayaan yang telah dilaksanakan di lingkungan satuan kerja. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kompetensi pegawai dan implementasi sistem keuangan secara umum, sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui penyusunan strategi pemberdayaan Perwira Keuangan yang mengintegrasikan aspek kompetensi sumber daya manusia, dukungan organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, serta analisis SWOT sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada penyusunan strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi militer dan dinamika transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan Perwira Keuangan dalam mendukung profesionalisme kinerja Keuangan Satuan Kerja (Ku Satker) pada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan Perwira Keuangan, serta merumuskan strategi pengembangan yang efektif melalui analisis SWOT sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan regulasi.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam strategi

pemberdayaan Perwira Keuangan dalam mendukung profesionalisme kinerja Keuangan Satuan Kerja (Ku Satker) pada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual, faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan, serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis melalui pengumpulan data yang diperoleh dari kondisi alamiah sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian (Creswell, 2016; Moleong, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lokasi penelitian dipilih karena Dispenad memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan satuan kerja yang harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan regulasi dan transformasi sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. Informan penelitian terdiri atas tujuh orang, meliputi dua informan pada tingkat kebijakan, dua informan pada tingkat operasional, dan tiga informan pada tingkat teknis yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan fungsi keuangan di lingkungan Dispenad. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas Perwira Keuangan, pemanfaatan aplikasi keuangan, serta kondisi nyata pengelolaan keuangan di satuan kerja. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kompetensi, kendala, dan strategi pemberdayaan Perwira Keuangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui telaah terhadap dokumen organisasi, antara lain laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban keuangan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Penggunaan berbagai teknik tersebut bertujuan meningkatkan kelengkapan dan kredibilitas data penelitian (Sugiyono, 2015).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses tersebut bertujuan memastikan konsistensi informasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Moleong, 2017). Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar data yang telah dianalisis. Untuk merumuskan strategi pemberdayaan Perwira Keuangan, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal organisasi sehingga diperoleh alternatif strategi yang mendukung peningkatan profesionalisme kinerja Keuangan Satuan Kerja di Dispenad.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Penelitian dilaksanakan di Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Jakarta Pusat dengan melibatkan tujuh informan yang terdiri atas pejabat tingkat kebijakan, operasional, dan teknis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan satuan kerja. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Perwira Keuangan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu kompetensi personel, pendidikan dan pelatihan, dukungan organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Faktor Pemberdayaan Perwira Keuangan

No	Aspek	Hasil Temuan
1	Kompetensi	Perwira Keuangan telah memiliki kompetensi dasar yang baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam penguasaan aplikasi SAKTI, regulasi keuangan, perpajakan, audit internal, dan manajemen risiko
2	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan, pelatihan, sertifikasi PPSPM, bimbingan teknis aplikasi keuangan, serta sosialisasi regulasi menjadi faktor utama peningkatan kompetensi personel.
3	Dukungan Organisasi	Organisasi telah memberikan dukungan, namun masih terdapat keterbatasan jumlah personel, tingginya beban kerja, dan belum optimalnya program pengembangan SDM
4	Teknologi Informasi	Pemanfaatan aplikasi SAKTI, aplikasi perpajakan, dan aplikasi pembayaran meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi membutuhkan peningkatan kemampuan pengguna

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa belum seluruh personel memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi keuangan. Selain itu, mekanisme transfer pengetahuan antar personel masih terbatas dan belum tersedia program pendampingan secara berkelanjutan. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan tergolong baik serta penyerapan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kesalahan administratif dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga diperlukan peningkatan ketelitian dan kompetensi personel. Analisis SWOT menghasilkan beberapa strategi pemberdayaan Perwira Keuangan yang dikelompokkan ke dalam empat alternatif strategi, yaitu strategi *Strengths-Opportunities* (SO), *Weaknesses-Opportunities* (WO), *Strengths-Threats* (ST), dan *Weaknesses-Threats* (WT).

Tabel 2. Hasil Identifikasi Faktor Pemberdayaan Perwira Keuangan

No	Strategi	Hasil Strategi
1	SO	Menyelenggarakan pendidikan khusus aplikasi keuangan, pendidikan Kapwabku, Tarminku, dan Tarwabku untuk meningkatkan kompetensi personel.
2	WO	Menambah personel sesuai DSPP serta meningkatkan keikutsertaan operator dan Pokmin dalam pendidikan dan pelatihan teknis
3	ST	Meningkatkan rekrutmen personel keuangan, menyelenggarakan penataran aplikasi keuangan, serta meningkatkan kemampuan penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
4	WT	Meningkatkan kualitas SDM operator, memperkuat pemahaman terhadap regulasi terbaru, dan memberdayakan personel baru melalui pembinaan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang terintegrasi antara peningkatan kompetensi, dukungan organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan di lingkungan Dispenad.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perwira Keuangan merupakan faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan satuan kerja. Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administrasi keuangan, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi informasi, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, dan adaptasi terhadap perubahan sistem pengelolaan keuangan negara. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi individu akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Pendidikan dan pelatihan terbukti menjadi instrumen utama dalam proses pemberdayaan Perwira Keuangan. Program sertifikasi PPSPM, bimbingan teknis aplikasi SAKTI, serta pelatihan pengelolaan keuangan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan teknis personel dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan merupakan strategi efektif dalam meningkatkan profesionalisme aparatur. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan. Implementasi aplikasi SAKTI, sistem perpajakan digital, serta aplikasi pembayaran mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses administrasi keuangan. Namun demikian, perubahan aplikasi yang berlangsung secara dinamis mengharuskan organisasi terus meningkatkan kapasitas personel agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang paling relevan untuk diterapkan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan khusus aplikasi keuangan, peningkatan jumlah personel sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme Perwira Keuangan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Perwira Keuangan merupakan strategi yang sangat penting dalam mendukung profesionalisme pengelolaan keuangan satuan kerja. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kompetensi individu, tetapi juga memerlukan dukungan organisasi, pembinaan yang berkesinambungan, serta kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan teknologi dan regulasi secara adaptif.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Perwira Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung profesionalisme kinerja Keuangan Satuan Kerja (Ku Satker) pada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad). Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi PPSPM, penguasaan aplikasi keuangan, dukungan organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama yang mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi pemberdayaan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pembinaan yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Perwira Keuangan dalam menghadapi perubahan regulasi dan transformasi digital pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu satuan kerja, yaitu Dispenad, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Darat. Selain itu, penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menitikberatkan pada pemahaman fenomena berdasarkan pengalaman para informan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak satuan kerja dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi pemberdayaan Perwira Keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan organisasi.

BIBLIOGRAPHY

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (16th ed.). Pearson.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Updating reference literature, especially those used to justify originality or novelty (in the Introduction), preferably the last 10 years. Primary reference literature, try to get a minimum of 80 percent from primary literature/scientific journals